



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMARNI**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **964810**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.009.800.000

1. Tanah Seluas 12.217 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 18.720 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 16.080 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 22.163 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 2.049 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 409.800.000
6. Tanah Seluas 10.050 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
7. Tanah Seluas 628 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah Seluas 565 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 482.950.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 E CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



2. MOBIL, DAIHAITSU MINIBUS Tahun 2025, HASIL SENDIRI	Rp.	
275.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA BJ8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	
7.000.000		
4. MOTOR, VESPA P150X Tahun 1984, HASIL SENDIRI	Rp.	950.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	370.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.062.750.000
III. HUTANG	Rp.	272.202.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.790.547.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.